

## PENGUATAN KESIAPAN USAHA MIKRO MELALUI KLINIK PEMETAAN PRODUK, LEGALITAS DASAR, DAN RENCANA AKSI DI FAOBATA

Made Ngurah Demi Andayana<sup>1\*</sup>, Umbu Tay W. Pariangu<sup>2</sup>,  
I Putu Yoga Bumi Pradana<sup>3</sup>, Nadia Sasmita Wijayanti<sup>4</sup>, Nuraini Kusuma Andriyani<sup>5</sup>,  
Maria Mega Putri Xavier<sup>6</sup>, Intan Bubur<sup>7</sup>, Indrika Amanda Junita Panggur<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia  
[yoga.pradana@staf.undana.ac.id](mailto:yoga.pradana@staf.undana.ac.id)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Penguatan usaha mikro di tingkat komunitas memerlukan penguatan hard skills berupa pemetaan produk, legalitas dasar, dan pembukuan mikro serta soft skills berupa pengambilan keputusan dan perencanaan tindakan usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kesiapan usaha mikro berbasis potensi lokal pada komunitas sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Juli 2026 dengan 25 mitra utama dari unsur masyarakat, pelaku atau rintisan usaha mikro, Pokdarwis, tokoh masyarakat, dan pemuda yang mengikuti rangkaian sampai tahap evaluasi. Transfer pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode campuran melalui pelatihan partisipatif, ceramah singkat, diskusi, klinik praktik, simulasi, dan penyusunan rencana aksi 30 hari. Rata-rata skor meningkat dari 89,76 menjadi 94,40. Sebanyak 12 peserta (48%) meningkat, 8 (32%) tetap, dan 5 (20%) menurun; 24 dari 25 peserta (96%) mencapai skor post-test minimal 80. Kegiatan menghasilkan perangkat kerja awal berupa format pemetaan produk, checklist legalitas, contoh buku kas, dan rencana aksi. Hasil menunjukkan penguasaan akhir yang tinggi, sementara evaluasi lanjutan perlu menekankan kualitas produk kerja dan adopsi praktik usaha.

**Kata Kunci:** Usaha Mikro; Pemetaan Produk Lokal; Legalitas Usaha; Pembukuan Mikro; Rencana Aksi.

**Abstract:** Strengthening community-level microenterprises requires technical hard skills in product mapping, basic business legality, and micro-bookkeeping, alongside soft skills in business decision-making and action planning. This community service program aimed to strengthen microenterprise readiness based on local potential within the target community. The core activity was conducted on 15 July 2026 with 25 main partners who completed the program through the evaluation stage. Knowledge and skill transfer used a mixed method combining participatory training, short lectures, discussion, practical clinics, simulation, and a 30-day action plan. The mean score increased from 89.76 to 94.40. Twelve participants (48%) improved, eight (32%) remained unchanged, and five (20%) decreased; 24 of 25 participants (96%) achieved a post-test score of at least 80. The program produced initial working tools consisting of a product-mapping format, legality checklist, cashbook example, and action-plan template. The results indicate high final mastery, while follow-up evaluation should emphasize the quality of practical outputs and adoption of business practices.

**Keywords:** Microenterprise; Local Product Mapping; Business Legality; Micro-Bookkeeping; Action Plan.



#### Article History:

Received: 17-08-2026  
Revised : 01-09-2026  
Accepted: 03-09-2026  
Online : 01-10-2026



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

## A. LATAR BELAKANG

Usaha mikro merupakan salah satu basis penting ekonomi lokal karena beroperasi dekat dengan rumah tangga, bahan baku setempat, pasar harian, dan jejaring sosial komunitas. McKenzie & Woodruff (2017) menunjukkan bahwa praktik manajemen dasar seperti perencanaan, pemasaran, pencatatan, dan pengendalian keuangan berkaitan dengan kinerja usaha kecil. Pada sisi intervensi, Gierszewska & Seretny (2019) menegaskan pentingnya perubahan perilaku dan praktik, sedangkan McKenzie (2021) menunjukkan bahwa pelatihan usaha lebih bermanfaat ketika pengetahuan diterjemahkan menjadi praktik yang dapat diterapkan.

Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, memiliki pelaku dan rintisan usaha yang bertumpu pada potensi lokal. Permasalahan mitra bukan semata ketiadaan komoditas atau aktivitas ekonomi, melainkan belum seluruh potensi tersebut diterjemahkan menjadi keputusan usaha yang terstruktur. Produk lokal perlu dipetakan berdasarkan ketersediaan bahan baku, keterampilan, peluang pasar, biaya awal, dan daya pembeda; pelaku usaha juga perlu memahami tahapan legalitas, membangun pencatatan sederhana, serta menetapkan tindakan lanjutan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Pemetaan produk lokal diperlukan agar pilihan usaha tidak hanya didasarkan pada intuisi atau kebiasaan. McKenzie dan Woodruff (2017) menunjukkan bahwa praktik usaha yang terstruktur berhubungan dengan kinerja perusahaan kecil, sementara Anderson et al. (2018) memperlihatkan bahwa kemampuan pemasaran dan keuangan menghasilkan jalur kinerja yang berbeda. Proses prioritas memberi ruang bagi komunitas untuk membandingkan potensi, risiko, dan kesiapan pelaku sebelum mengalokasikan waktu serta sumber daya. Assenova dan Sorenson (2017) menekankan manfaat legitimasi dari formalisasi usaha, sedangkan Wurth et al. (2022) menempatkan keputusan kewirausahaan dalam keterhubungan dengan ekosistem pendukung. Pada saat yang sama, penguatan identitas dan nilai tambah produk membantu pelaku membedakan produknya dan membuka akses yang lebih luas sesuai kapasitas usaha.

Dimensi keuangan juga menjadi titik kritis. Álvarez-Castañón (2022) menempatkan literasi keuangan sebagai kapasitas penting bagi UKM, sedangkan McKenzie dan Woodruff (2017) menunjukkan bahwa pencatatan dan kontrol keuangan merupakan bagian dari praktik manajemen yang berkaitan dengan kinerja. Literasi keuangan perlu dihubungkan dengan kebiasaan pencatatan, pemisahan uang usaha dan rumah tangga, serta penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Anderson et al. (2018) memperlihatkan bahwa keterampilan keuangan dan pemasaran memengaruhi kinerja melalui mekanisme berbeda, dan McKenzie (2021) menekankan pentingnya desain pelatihan yang mendorong adopsi praktik. Karena itu, program memasukkan simulasi buku kas sederhana sebagai bagian inti klinik.

Kesiapan usaha juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kelembagaan. Jejaring komunitas, dukungan pemerintah lokal, legitimasi sosial, dan hubungan dengan aktor pendukung dapat memperkuat peluang kewirausahaan, terutama pada wilayah yang bertumpu pada sumber daya lokal (de Guzman et al., 2020; Kania et al., 2021). Perspektif ekosistem kewirausahaan menegaskan bahwa kemampuan pelaku perlu terhubung dengan institusi, jejaring, dan dukungan yang memungkinkan praktik usaha berkembang secara berkelanjutan (Wurth et al., 2022).

Kegiatan memiliki relevansi terhadap pembangunan berkelanjutan. Writer (2023) menempatkan kewirausahaan produktif dalam SDG 8 dan pola produksi yang bertanggung jawab dalam SDG 12. Dalam konteks lokal, Kania et al. (2021) menunjukkan arti dukungan kelembagaan bagi kewirausahaan perdesaan, sementara Wurth et al. (2022) menekankan keterhubungan kapasitas pelaku dengan ekosistem usaha. Keterkaitan dengan SDG 1 dan SDG 2 bersifat programatik karena usaha berbasis komoditas lokal berpotensi memperluas sumber pendapatan dan nilai tambah pangan. Namun, program satu hari belum menyediakan bukti peningkatan pendapatan, pekerjaan, atau penurunan kemiskinan sehingga kontribusi tersebut ditempatkan pada level kapasitas dan prasyarat perubahan.

Atas dasar permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian bertujuan meningkatkan kemampuan peserta memetakan dan memilih produk lokal prioritas; memperkuat pemahaman mengenai nilai tambah, identitas usaha, dan legalitas dasar; meningkatkan kemampuan pencatatan keuangan mikro; serta menghasilkan rencana aksi 30 hari yang konkret dan terukur. Artikel ini memaparkan proses pelaksanaan, keluaran praktik, hasil evaluasi pre-test dan post-test, kontribusi terhadap SDGs, serta keterbatasan bukti dan agenda tindak lanjut.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan dilaksanakan di wilayah Faobata pada 15 Juli 2026. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah 25 anggota masyarakat yang merupakan pelaku atau perintis usaha mikro berbasis potensi lokal dan mengikuti seluruh rangkaian sampai tahap evaluasi. Program didukung oleh Pemerintah Kelurahan Faobata dalam koordinasi, fasilitasi peserta, dan pelaksanaan kegiatan. Penetapan 25 mitra sebagai basis kegiatan sekaligus analisis menjaga konsistensi antara partisipasi, evaluasi, dan pelaporan hasil.

Metode pelaksanaan menggunakan metode campuran berbasis capacity building yang memadukan pelatihan partisipatif, ceramah singkat, diskusi, klinik praktik, pemetaan partisipatif, simulasi pembukuan, dan penyusunan rencana aksi (Tiwari & Rangnekar, 2025; Wijaya & Elba, 2020). Untuk memperjelas alur, kegiatan disusun dalam tiga tahap utama: (1) tahap pra-kegiatan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap evaluasi. Pada tahap pra-

kegiatan dilakukan koordinasi, pemetaan kebutuhan, penyusunan materi, instrumen pre-test/post-test, dan perangkat klinik. Tahap pelaksanaan meliputi pre-test, penyampaian materi, pemetaan produk, nilai tambah, legalitas, pembukuan, serta klinik rencana aksi. Tahap evaluasi mencakup post-test, observasi keterlibatan, pemeriksaan perangkat praktik, refleksi, dan penyusunan tindak lanjut 30 hari.

Monitoring pada tahap evaluasi dilakukan melalui observasi keterlibatan peserta, diskusi fasilitator, pemeriksaan perangkat praktik, dan dokumentasi berpenanda lokasi serta waktu. Evaluasi kognitif menggunakan dua kelompok materi dengan total 25 butir, terdiri atas 10 butir Materi 1 dan 15 butir Materi 2. Skor dikonversi ke skala 0-100 dan dianalisis secara deskriptif melalui rata-rata, perubahan skor individual, proporsi peserta yang meningkat, tetap, dan menurun, serta capaian skor post-test minimal 80. Evaluasi praktik membedakan perangkat yang tersedia, proses yang terdokumentasi, dan lembar kerja final yang belum seluruhnya terkonsolidasi, seperti terlihat pada Gambar 1 dan Tabel 1.



Gambar 1. Alur metode pelaksanaan pelatihan dan klinik praktik.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan dan Keluaran yang Diharapkan

| Tahap        | Aktivitas utama                                                                                 | Keluaran                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pra-kegiatan | Koordinasi, identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, instrumen, dan perangkat klinik          | Kesiapan administrasi, data kebutuhan, dan perangkat belajar        |
| Pelaksanaan  | Pre-test, pemetaan produk, nilai tambah, legalitas, pembukuan, klinik praktik, dan rencana aksi | Pemahaman konseptual, latihan operasional, dan perangkat kerja awal |
| Evaluasi     | Post-test, observasi, refleksi, pemeriksaan perangkat, dan penetapan tindak lanjut              | Data evaluasi, bukti proses, dan agenda 30 hari                     |

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Pra-Kegiatan: Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap pra-kegiatan menghasilkan koordinasi dengan mitra pendukung, agenda kegiatan, pembagian tugas tim, materi pelatihan, instrumen pre-test dan post-test, serta perangkat praktik. Kondisi awal menunjukkan bahwa potensi produk dan aktivitas ekonomi lokal tersedia, tetapi proses penentuan produk prioritas, penguatan identitas, pemetaan legalitas, dan pencatatan keuangan belum seluruhnya tersusun sebagai urutan keputusan usaha. Karena itu, klinik dirancang untuk menghubungkan setiap aspek tersebut

dalam satu alur kesiapan usaha yang sederhana dan dapat digunakan kembali setelah pelatihan.

Diskusi dengan mitra menunjukkan bahwa kebutuhan utama berada pada transformasi potensi menjadi produk yang lebih siap dipasarkan dan dikelola. Pelaku membutuhkan kriteria sederhana untuk memilih produk, pemahaman mengenai langkah legalitas yang relevan, pencatatan arus kas yang mudah diterapkan, serta rencana tindakan yang tidak terlalu besar tetapi dapat dibuktikan. Kebutuhan ini sejalan dengan temuan bahwa praktik manajemen dasar dan kemampuan mengubah pengetahuan menjadi perilaku usaha merupakan bagian penting dalam penguatan usaha kecil (McKenzie, 2021; McKenzie & Woodruff, 2017). Ringkasan kebutuhan intervensi disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Kondisi Awal dan Kebutuhan Intervensi Mitra

| <b>Dimensi</b>         | <b>Kondisi awal</b>                                                               | <b>Kebutuhan intervensi</b>                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pemetaan produk        | Potensi tersedia tetapi belum seluruhnya diprioritaskan dengan kriteria sederhana | Kriteria bahan baku, keterampilan, pasar, biaya, dan daya beda |
| Nilai tambah/identitas | Diferensiasi produk dan identitas usaha masih perlu diperkuat                     | Kemasan, nama, narasi, ukuran, dan komunikasi produk           |
| Legalitas dasar        | Kebutuhan NIB dan legalitas produk belum seluruhnya dipetakan                     | Checklist legalitas sesuai jenis usaha dan produk              |
| Pembukuan mikro        | Pencatatan uang masuk dan keluar belum konsisten                                  | Buku kas sederhana dan pemisahan uang usaha-rumah tangga       |
| Keberlanjutan          | Belum ada langkah tindak lanjut terukur setelah pelatihan                         | Rencana aksi 30 hari dengan waktu, penanggung jawab, dan bukti |

## **2. Tahap Pelaksanaan: Pelatihan dan Klinik Praktik**

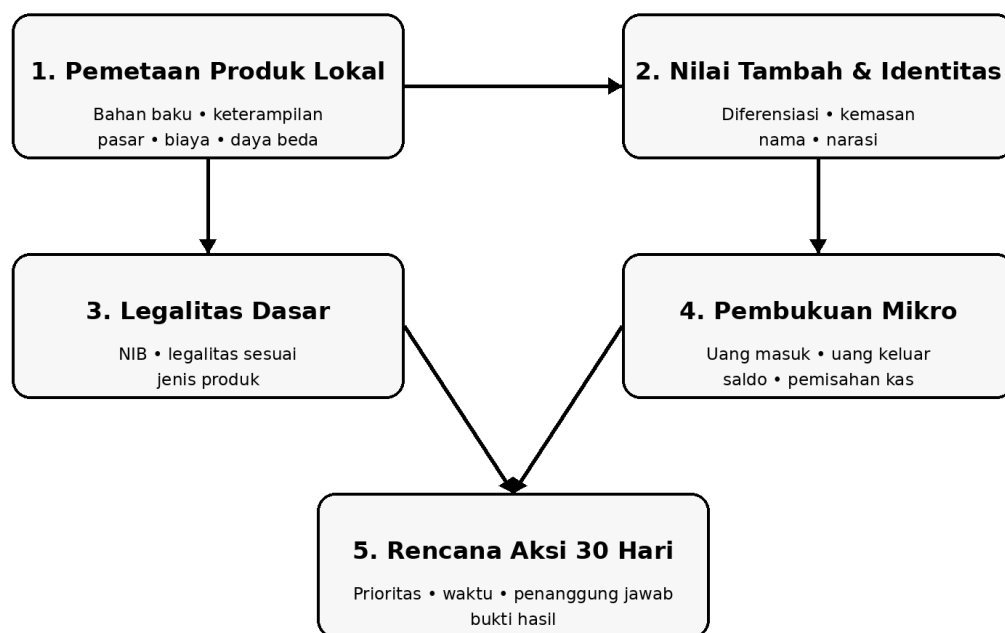
Tahap pelaksanaan diawali dengan pre-test, dilanjutkan pelatihan dan klinik praktik yang mengintegrasikan pemetaan produk lokal, penguatan nilai tambah dan identitas, legalitas dasar, pembukuan mikro, serta rencana aksi. Model tatap muka memungkinkan transfer pengetahuan melalui penjelasan singkat sekaligus transfer keterampilan melalui latihan, simulasi, diskusi, dan pengisian perangkat kerja.

### **a. Pemetaan Produk Lokal dan Nilai Tambah**

Materi pertama menekankan pemetaan potensi produk lokal dan pemilihan produk prioritas. Peserta diarahkan menggunakan kriteria yang mudah diterapkan, yaitu ketersediaan bahan baku, keterampilan, peluang pasar, kebutuhan biaya awal, dan daya pembeda produk. Pendekatan ini menggeser proses pemilihan dari preferensi semata menuju keputusan yang dapat dibandingkan dan didiskusikan. Pemetaan juga memberi ruang bagi pengetahuan lokal

untuk diterjemahkan menjadi informasi yang lebih operasional dalam menentukan fokus usaha.

Tahap berikutnya menghubungkan pilihan produk dengan nilai tambah dan identitas. Peserta didorong melihat bahwa kualitas, kemasan, nama, narasi, ukuran, dan saluran pemasaran dapat membentuk posisi produk yang berbeda tanpa selalu membutuhkan investasi besar. Perubahan kecil pada diferensiasi, keteraturan produksi, dan komunikasi produk dapat menjadi titik awal penguatan pasar. Prinsip tersebut konsisten dengan pentingnya praktik pemasaran dan manajemen terhadap kinerja usaha kecil (Anderson et al., 2018; McKenzie & Woodruff, 2017). Hasil pengolahan alur kesiapan usaha divisualisasikan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Jalur kesiapan usaha mikro berbasis potensi lokal sebagai kerangka praktik.

Sumber: konstruksi penulis, 2026

b. Klinik Legalitas, Pembukuan Mikro, dan Rencana Aksi

Materi kedua menempatkan legalitas sebagai tahapan penguatan usaha, bukan sekadar beban administratif. Peserta memetakan kebutuhan NIB dan legalitas produk sesuai jenis usaha, termasuk kemungkinan kebutuhan perizinan pangan, jaminan produk halal, label, dan merek. Orientasi ini selaras dengan kebijakan kemudahan dan pemberdayaan UMKM serta perkembangan perizinan berusaha berbasis risiko (Pemerintah Republik Indonesia, 2024, 2025). Untuk produk yang relevan, aspek jaminan produk halal juga diperkenalkan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Pembukuan mikro dilatih melalui format yang sangat sederhana: uang masuk, uang keluar, dan saldo. Penekanan utama bukan pada kompleksitas akuntansi, melainkan pada disiplin memisahkan transaksi usaha dari kebutuhan rumah tangga dan menggunakan catatan sebagai dasar keputusan. Pendekatan ini relevan dengan literatur yang menempatkan literasi keuangan dan praktik keuangan sebagai kapasitas penting bagi keberlangsungan usaha kecil (Álvarez-Castañón, 2022).

Seluruh materi kemudian diikat melalui rencana aksi 30 hari. Peserta diarahkan menetapkan langkah kecil dan terukur, misalnya memilih produk prioritas, memperbaiki identitas atau kemasan, mengurus satu kebutuhan legalitas, mulai menggunakan buku kas, atau melakukan uji jual. Setiap langkah perlu memiliki waktu, penanggung jawab, dan bukti. Komponen perangkat klinik disajikan pada Tabel 3, sedangkan interaksi fasilitator dan peserta selama pelaksanaan didokumentasikan pada Gambar 3.

**Tabel 3.** Komponen dan Fungsi Perangkat Klinik Kesiapan Usaha Mikro

| Komponen                      | Fungsi praktis                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lembar pemetaan produk        | Membandingkan potensi berdasarkan bahan baku, keterampilan, pasar, biaya, dan daya beda |
| Format nilai tambah/identitas | Mengembangkan diferensiasi, kemasan, nama, dan narasi sederhana                         |
| Checklist legalitas           | Memetakan NIB dan kebutuhan legalitas sesuai jenis usaha atau produk                    |
| Contoh buku kas mikro         | Mencatat uang masuk, uang keluar, dan saldo                                             |
| Panduan pemisahan kas         | Membedakan uang usaha dan kebutuhan rumah tangga                                        |
| Format prioritas tindakan     | Menentukan langkah kecil yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu                  |
| Rencana aksi 30 hari          | Mengikat kegiatan, waktu, penanggung jawab, dan bukti hasil                             |



**Gambar 3.** Interaksi fasilitator dan peserta dalam pelaksanaan pelatihan dan klinik praktik.

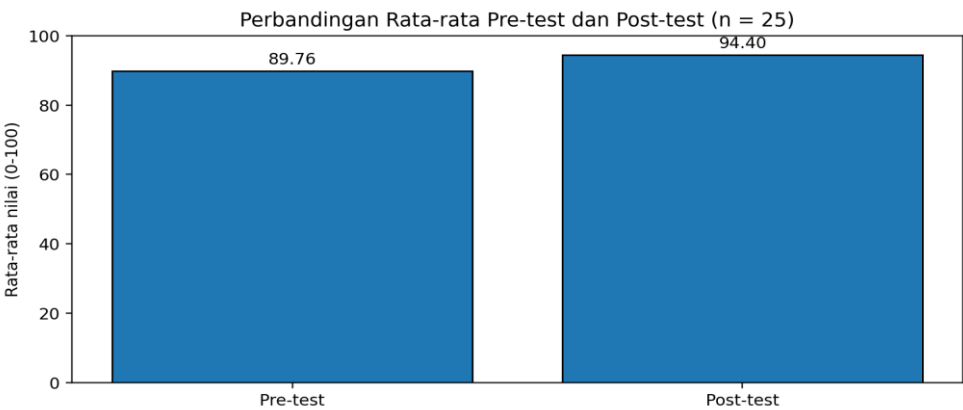
3. Tahap Evaluasi: Monitoring, Capaian, dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi melibatkan 25 mitra utama yang menyelesaikan rangkaian kegiatan sampai post-test. Monitoring dilakukan melalui observasi keterlibatan, diskusi fasilitator, pemeriksaan perangkat praktik, dan refleksi. Pemilihan satu basis peserta yang sama untuk evaluasi menghilangkan perbedaan denominator antara partisipasi dan analisis hasil. Komposisi lintas unsur tetap penting karena penguatan ekonomi lokal dipengaruhi bukan hanya oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh jejaring sosial, legitimasi komunitas, dan dukungan kelembagaan (de Guzman et al., 2020; Kania et al., 2021).

Evaluasi kognitif menggunakan 25 peserta yang memiliki pasangan data lengkap. Rata-rata skor pre-test sebesar 89,76 dan meningkat menjadi 94,40 pada post-test, atau bertambah 4,64 poin. Secara individual, 12 peserta (48%) meningkat, 8 peserta (32%) tetap, dan 5 peserta (20%) menurun. Sebanyak 24 dari 25 peserta (96%) mencapai skor post-test minimal 80. Pada tingkat materi, Materi 1 meningkat dari 88,0 menjadi 98,0, sedangkan Materi 2 meningkat dari 90,93 menjadi 92,00. Ringkasan hasil disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 4.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test (n = 25)

| Indikator         | Pre-test       | Post-test      | Interpretasi                                     |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Rata-rata skor    | 89,76          | 94,40          | Naik 4,64 poin                                   |
| Skor ≥80          | 21/25<br>(84%) | 24/25<br>(96%) | Penguasaan akhir tinggi                          |
| Peserta meningkat | -              | 12 (48%)       | Target 80% peningkatan individual belum tercapai |
| Peserta tetap     | -              | 8 (32%)        | Skor total tidak berubah                         |
| Peserta menurun   | -              | 5 (20%)        | Skor total lebih rendah                          |



Gambar 4. Perbandingan rata-rata pre-test dan post-test peserta dengan data berpasangan.  
Sumber: Data Primer, 2026

Interpretasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Target proposal berupa minimal 80% peserta mengalami peningkatan belum tercapai apabila dimaknai sebagai proporsi individu yang skornya naik, karena hanya 48%

peserta dengan data berpasangan yang meningkat. Namun, baseline peserta sudah tinggi: 21 dari 25 peserta (84%) memiliki skor awal minimal 80 dan 24 dari 25 peserta (96%) mencapai skor akhir minimal 80. Kondisi ini membatasi ruang kenaikan dan menunjukkan bahwa tes pengetahuan saja belum cukup sensitif untuk menangkap perubahan kompetensi praktik.

Bukti capaian yang lebih substantif berada pada dimensi keterampilan dan kesiapan kerja. Kegiatan menyediakan format pemetaan produk, checklist legalitas, contoh buku kas, dan rencana aksi yang digunakan selama proses pelatihan. Namun, seluruh lembar kerja final peserta belum terkonsolidasi dalam satu paket eviden. Karena itu, artikel membatasi klaim pada perangkat yang tersedia dan proses yang terdokumentasi, sementara outcome ekonomi seperti peningkatan omzet, profit, atau pendapatan belum dapat dinilai pada tahap ini.

#### **4. Kendala Pelaksanaan dan Solusi**

Kendala utama kegiatan adalah tingginya baseline pengetahuan serta belum lengkapnya kompilasi lembar kerja final, bukan lagi perbedaan jumlah peserta karena basis mitra dan evaluasi telah diseragamkan pada 25 peserta. Kondisi tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan inti, tetapi memengaruhi sensitivitas indikator hasil dan kedalaman bukti praktik yang dapat disajikan. Karena itu, pemisahan tetap diperlukan antara perubahan pengetahuan, kualitas produk kerja, dan adopsi praktik usaha.

Solusi yang ditetapkan adalah mengumpulkan dan memvalidasi seluruh lembar kerja peserta, menambahkan rubrik keterampilan dan bukti adopsi praktik pada evaluasi berikutnya, serta melakukan monitoring rencana aksi 30 hari. Pendekatan ini lebih sesuai dengan karakter pelatihan usaha karena keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh skor pengetahuan, tetapi oleh perubahan praktik manajemen dan perilaku yang dapat diamati setelah pelatihan (McKenzie, 2021).

#### **5. Kontribusi Terhadap SDGs dan Tindak Lanjut**

Kontribusi kegiatan terhadap Sustainable Development Goals ditempatkan pada level kapasitas dan mekanisme pendukung, bukan outcome makro. SDG 8 didukung melalui penguatan kesiapan kewirausahaan dan praktik usaha produktif, sedangkan SDG 12 melalui penguatan kualitas produk, pencatatan, identitas, dan legalitas. Keterkaitan dengan SDG 1 dan SDG 2 bersifat programatik karena usaha berbasis potensi lokal dapat memperluas sumber pendapatan dan nilai tambah pangan. Posisi ini proporsional karena kegiatan satu hari belum menyediakan bukti tentang penciptaan pekerjaan, kenaikan pendapatan, atau penurunan kemiskinan.

Tindak lanjut 30 hari diarahkan pada pemilihan produk prioritas, perbaikan identitas atau kemasan awal, pemetaan kebutuhan legalitas,

penggunaan buku kas, dan uji jual sederhana. Pada tahap berikutnya, klinik terbatas dapat diberikan kepada peserta yang membutuhkan pendampingan legalitas dan pembukuan. Monitoring dapat menggunakan indikator sederhana berupa bukti produk, status legalitas, keberadaan pencatatan kas, pelaksanaan uji jual, dan perubahan pendapatan yang dapat ditelusuri. Pada level kelembagaan, jejaring pemerintah kelurahan, komunitas, dan perguruan tinggi perlu dipertahankan sebagai lingkungan pendukung perubahan (Wurth et al., 2022).

**Tabel 5.** Kontribusi Program terhadap SDGs yang Relevan

| SDG/Target | Bentuk kontribusi                                                    | Bukti saat ini                             | Batas klaim                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SDG 8      | Penguatan kesiapan kewirausahaan, pembukuan, dan rencana usaha       | Materi, praktik, dan rencana aksi          | Belum ada data pekerjaan atau peningkatan pendapatan   |
| SDG 12     | Penguatan kualitas, identitas, pencatatan, dan legalitas produk      | Checklist, buku kas, dan perangkat praktik | Belum mengukur perubahan pola produksi jangka panjang  |
| SDG 1      | Potensi perluasan sumber pendapatan rumah tangga melalui usaha lokal | Kapasitas dan agenda tindak lanjut         | Belum ada bukti penurunan kemiskinan                   |
| SDG 2      | Potensi peningkatan nilai tambah komoditas pangan lokal              | Pemetaan produk berbasis potensi lokal     | Belum ada data ketahanan pangan atau pendapatan pangan |

**D. SIMPULAN DAN SARAN**

Klinik kesiapan usaha mikro berbasis komunitas di wilayah Faobata berhasil dilaksanakan dengan 25 mitra utama yang mengikuti rangkaian sampai tahap evaluasi dan menghasilkan perangkat awal untuk pemetaan produk lokal, penguatan nilai tambah dan identitas, legalitas dasar, pembukuan mikro, serta rencana aksi 30 hari. Rata-rata skor meningkat dari 89,76 menjadi 94,40. Sebanyak 48% peserta meningkat, 32% tetap, dan 20% menurun, sementara 96% mencapai skor post-test minimal 80. Hasil tersebut menunjukkan penguasaan akhir yang tinggi, tetapi target minimal 80% peserta mengalami peningkatan individual belum tercapai, terutama karena baseline pengetahuan relatif tinggi.

Pendampingan berikutnya perlu memprioritaskan kompilasi lembar kerja final, monitoring rencana aksi 30 hari, pendampingan legalitas dan pembukuan bagi peserta yang membutuhkan, serta penggunaan rubrik keterampilan dan bukti adopsi praktik. Kontribusi terhadap SDG 8 dan SDG 12 dapat dinyatakan pada level penguatan kapasitas dan kesiapan usaha, sedangkan keterkaitan dengan SDG 1 dan SDG 2 masih bersifat programatik. Dampak terhadap pendapatan, pekerjaan, produktivitas, dan kemiskinan perlu diuji melalui evaluasi pascaintervensi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nusa Cendana atas dukungan Program Pengabdian kepada Masyarakat DIPA Tahun 2026 (Nomor Kontrak 867/UN15.22/PM/2026). Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Faobata sebagai mitra pendukung, masyarakat, Pokdarwis, pemuda, tokoh masyarakat, dan seluruh mitra yang berpartisipasi dalam pelatihan, klinik praktik, evaluasi, serta penyusunan agenda tindak lanjut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Álvarez-Castañón, L. del C. (2022). University Knowledge Transfer to Its Environment and STI Policies. In O. J. Montiel Méndez & A. A. Alvarado (Eds.), *The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Latin America* (pp. 159–175). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80071-955-220221011>
- Anderson, S. J., Chandy, R., & Zia, B. (2018). Pathways to profits: The impact of marketing vs. finance skills on business performance. *Management Science*, 64(12). <https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.2920>
- Assenova, V. A., & Sorenson, O. (2017). Legitimacy and the benefits of firm formalization. *Organization Science*, 28(5). <https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1146>
- de Guzman, M. R. T., Kim, S., Taylor, S., & Padasas, I. (2020). Rural communities as a context for entrepreneurship: Exploring perceptions of youth and business owners. *Journal of Rural Studies*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.06.036>
- Gierszewska, G., & Seretny, M. (2019). Sustainable Behavior-The Need of Change in Consumer and Business Attitudes and Behavior. *Foundations of Management*, 11(1). <https://doi.org/10.2478/fman-2019-0017>
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village-owned enterprises in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities*, 15(3). <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>
- McKenzie, D. (2021). Small business training to improve management practices in developing countries: Re-assessing the evidence for “training doesn’t work.” In *Oxford Review of Economic Policy* (Vol. 37, Number 2). <https://doi.org/10.1093/oxrep/grab002>
- McKenzie, D., & Woodruff, C. (2017). Business practices in small firms in developing countries. *Management Science*, 63(9). <https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2492>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Tiwari, N. K., & Rangnekar, S. (2025). Participative management style and learning at work: mediating role of participative strategic planning processes and moderating role of supervisory communication. *International Journal of Management Practice*, 18(1). <https://doi.org/10.1504/IJMP.2025.143128>
- Wijaya, M., & Elba, F. (2020). Participative Learning to Improve Female Adolescents’ Knowledge on The Risks of. *International Journal of Nursing*

- and Midwifery Science (IJNMS)*, 4(1).  
<https://doi.org/10.29082/ijnms/2020/vol4/iss1/268>
- Writer, S. (2023). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs. In *United Nations*.
- Wurth, B., Stam, E., & Spigel, B. (2022). Toward an Entrepreneurial Ecosystem Research Program. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 46(3).  
<https://doi.org/10.1177/1042258721998948>